

Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dengan Kualitas Pelayanan Publik Sebagai Variabel Intervening

Inalatul Ulya¹, Sobrotul Imtikhanah²

¹*Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
inalatululya27@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pengaruh belanja daerah pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah, dengan menempatkan kualitas pelayanan publik sebagai variabel intervening. Latar belakang penelitian didasarkan pada pentingnya peran alokasi anggaran daerah dalam meningkatkan dimensi-dimensi utama IPM, yakni pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak, yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh kualitas pelayanan publik. Data sekunder dikumpulkan dari 35 kabupaten/kota selama periode 2019–2023, yang mencakup data realisasi anggaran sektor publik, indeks IPM, dan indikator kualitas pelayanan publik. Analisis dilakukan menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh langsung, serta uji Sobel untuk mengidentifikasi efek mediasi. Hasil penelitian mengungkap bahwa belanja pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan belanja infrastruktur tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Lebih lanjut, kualitas pelayanan publik terbukti memediasi secara signifikan hubungan antara belanja sektor publik dan IPM, memperkuat dampak belanja daerah terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas belanja publik tidak hanya ditentukan oleh besaran anggaran, tetapi juga oleh kualitas implementasi kebijakan dan layanan yang diterima masyarakat. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik, serta memprioritaskan sektor-sektor strategis yang memiliki kontribusi langsung terhadap peningkatan IPM, sehingga pembangunan manusia dapat berjalan secara merata, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Belanja Infrastruktur, Kualitas Pelayanan Publik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Analysis of the Influence of Education Spending, Health Spending, and Infrastructure Spending on the Human Development Index in Central Java Regencies/Cities with Public Service Quality as an Intervening Variable

Abstract

This study aims to comprehensively analyze the influence of regional spending in the education, health, and infrastructure sectors on the Human Development Index (HDI) in districts/cities of Central Java Province, by placing the quality of public services as an intervening variable. The background of the research is based on the importance of the role of regional budget allocation in improving the main dimensions of HDI, namely education, health, and decent living standards, which are indirectly influenced by the quality of public services. Secondary data was collected from 35 districts/cities during the 2019–2023 period, which included data on public sector budget realization, HDI index, and public service quality indicators. The analysis was performed using multiple linear regression to test for direct influences, as well as the Sobel test to identify the mediating effect. The results of the study revealed that education and health spending have a positive and significant influence on HDI, while infrastructure spending has little to no influence. Furthermore, the quality of public services has been proven to mediate the relationship between public sector spending and HDI significantly, strengthening the impact of regional expenditure on improving people's quality of life. These findings confirm that the effectiveness of public spending is not only determined by the amount of the budget, but also by the quality of the implementation of policies and services received by the public. The practical implication of this research is the need for local governments to optimize the planning and implementation of performance-based budgets, increase the accountability of public services, and prioritize strategic sectors that have a direct contribution to improving HDI, so that human development can run evenly, sustainably, and adaptively to the dynamics of community needs.

Keywords: *Education Spending, Health Spending, Infrastructure Spending, Public Service Quality, Human Development Index (HDI)*

PENDAHULUAN

Pembangunan manusia merupakan pondasi utama dalam mencapai kesejahteraan nasional, yang diukur melalui **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** dengan tiga dimensi utama: pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak (Hamid et al., 2024, p.17). Sejak diberlakukannya **otonomi daerah** melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pemerintah daerah memiliki kewenangan luas dalam mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan masyarakat lokal, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat (Rahmawati, 2020, p.45). Namun, efektivitas belanja publik tidak hanya ditentukan oleh besaran anggaran, tetapi juga bergantung pada kualitas implementasi dan pelayanan publik yang diberikan (Ratuludji et al., 2023, p.12).

Penelitian ini dilakukan pada Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan perkembangan pembangunan yang cukup pesat. Dimana Anggaran Belanja Pembangunan pada APBD Jawa Tengah yang mengalami peningkatan setiap tahunnya khususnya dalam lima sampai sepuluh tahun terakhir, pada sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dari rangkaian temuan penelitian yang telah diurai terkait permasalahan atau faktor yang mempengaruhi IPM yang terdapat di beberapa daerah (Damayanti & Suryaningrum, 2023).

Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan IPM Jawa Tengah



Sumber : BPS, Data diolah

Berdasarkan data dari BPS secara keseluruhan, pembangunan manusia di Jawa Tengah terus menunjukkan kemajuan sepanjang periode 2011 hingga 2019. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah mengalami peningkatan dari 66,64 pada tahun 2011 menjadi 71,73 pada tahun 2019. Selama periode tersebut, IPM Jawa Tengah tumbuh rata-rata sebesar 0,95 persen per tahun. Pada periode 2018-2019, IPM Jawa Tengah meningkat sebesar 0,86 persen atau bertambah 0,61 poin. Kenaikan pada periode ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode 2016-2017 yang mencatat peningkatan 0,54 poin, maupun periode 2017-2018 dengan kenaikan 0,60 poin. Tahun 2019 juga menandai tahun ketiga berturut-turut IPM Jawa Tengah berada dalam kategori "tinggi," dengan nilai IPM yang melampaui angka 70.

Gambar STYLEREF 1 \s 1. SEQ Gambar * ARABIC \s 1 2



Sumber : BPS Jawa Tengah (Diolah)

Setelah melihat tren IPM secara agregat di beberapa provinsi di Jawa (Gambar 1.2), penting untuk mendalami variasi di tingkat lokal. Dalam hal ini, Tabel 1.1 menyajikan data Indeks Pembangunan Manusia per kabupaten/kota di Jawa Tengah, yang memungkinkan analisis lebih mendalam mengenai distribusi dan ketimpangan IPM dalam lingkup provinsi tersebut.

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Pembangunan Manusia
1	3301 Kabupaten Cilacap	72,38
2	3302 Kabupaten Banyumas	74,52
3	3303 Kabupaten Purbalingga	70,69
4	3304 Kabupaten Banjarnegara	69,60
5	3305 Kabupaten Kebumen	71,93
6	3306 Kabupaten Purworejo	75,11
7	3307 Kabupaten Wonosobo	69,82
8	3308 Kabupaten Magelang	71,99
9	3309 Kabupaten Boyolali	75,96
10	3310 Kabupaten Klaten	78,16
11	3311 Kabupaten Sukoharjo	79,30
12	3312 Kabupaten Wonogiri	72,55
13	3313 Kabupaten Karanganyar	78,11
14	3314 Kabupaten Sragen	75,53
15	3315 Kabupaten Grobogan	72,02

No	Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Pembangunan Manusia
16	3316 Kabupaten Blora	71,39
17	3317 Kabupaten Rembang	72,53
18	3318 Kabupaten Pati	74,10
19	3319 Kabupaten Kudus	77,22
20	3320 Kabupaten Jepara	74,32
21	3321 Kabupaten Demak	74,57
22	3322 Kabupaten Semarang	75,67
23	3323 Kabupaten Temanggung	71,87
24	3324 Kabupaten Kendal	74,34
25	3325 Kabupaten Batang	70,74
26	3326 Kabupaten Pekalongan	71,84
27	3327 Kabupaten Pemalang	68,55
28	3328 Kabupaten Tegal	70,77
29	3329 Kabupaten Brebes	68,46
30	3371 Kota Magelang	82,15
31	3372 Kota Surakarta	84,40
32	3373 Kota Salatiga	85,72
33	3374 Kota Semarang	85,25
34	3375 Kota Pekalongan	77,22
35	3376 Kota Tegal	77,43

Sumber : BPS Jawa Tengah (Diolah)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah berada pada posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Pada tahun 2022, IPM Jawa Tengah tercatat sebesar 72,80 (Saputra *et al.*, 2023). Sebagai perbandingan, DKI Jakarta memiliki IPM tertinggi dengan nilai 81,65, diikuti oleh DI Yogyakarta (80,64), Jawa Barat (72,45), Banten (72,45), dan Jawa Timur (72,75). Meskipun IPM Jawa Tengah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, posisinya relatif lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Jawa Tengah perlu ditingkatkan untuk mencapai kesetaraan pembangunan dengan provinsi-provinsi tetangga (Saputra *et al.*, 2023).

Provinsi Jawa Tengah menjadi perhatian karena meskipun IPM terus meningkat dari 66,64 pada tahun 2011 menjadi 72,80 pada tahun 2022, posisinya masih lebih rendah dibandingkan DKI Jakarta (81,65) atau DI Yogyakarta (80,64) (Saputra *et al.*, 2023, p.9). Selain itu, terdapat disparitas antar kabupaten/kota,

misalnya Kota Surakarta dengan IPM 84,40, jauh lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Brebes yang hanya 68,46 (BPS Jawa Tengah, 2024, p.15). Kondisi ini menegaskan perlunya evaluasi efektivitas belanja daerah dalam mendorong pemerataan pembangunan manusia.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Sari et al. (2016, p.78) menemukan bahwa belanja pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif signifikan terhadap IPM, sementara Prastiwi dan Handayani (2021, p.63) menyatakan belanja pendidikan berpengaruh positif namun tidak signifikan, sedangkan belanja kesehatan justru berpengaruh negatif signifikan. Hasil berbeda juga ditunjukkan oleh Ratuludji et al. (2023, p.20) yang menemukan belanja infrastruktur berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM. Perbedaan temuan ini menegaskan adanya kesenjangan literatur, serta pentingnya memasukkan **kualitas pelayanan publik** sebagai variabel mediasi dalam menganalisis hubungan belanja publik dan IPM (Almahdali, 2025, p.33).

Dalam penelitian ini, **belanja pendidikan** diartikan sebagai pengeluaran pemerintah daerah yang bersumber dari APBN/APBD dan dialokasikan untuk sektor pendidikan, termasuk pembangunan infrastruktur pendidikan, gaji tenaga pendidik, serta biaya operasional sekolah (Ningsih & Kara, 2023, p.55). **Belanja kesehatan** mencakup pengeluaran pemerintah untuk penyediaan fasilitas kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga medis, obat-obatan, serta program layanan preventif (Sandri et al., 2018, p.102). Sementara itu, **belanja infrastruktur** meliputi pembangunan sarana transportasi, perumahan, penyediaan air bersih, sanitasi, serta infrastruktur publik lainnya yang mendukung produktivitas masyarakat (Mongan, 2019, p.88).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sendiri merupakan indikator komposit yang dihitung dari tiga aspek: umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan (Palayukan, 2019, p.41). Adapun **kualitas pelayanan publik** dipahami sebagai ukuran efektivitas dan efisiensi pelayanan pemerintah kepada masyarakat, yang mencerminkan sejauh mana masyarakat memperoleh akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang memadai (Almahdali, 2025, p.34).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk menganalisis pengaruh **belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap IPM kabupaten/kota di Jawa Tengah** dengan **kualitas pelayanan publik sebagai variabel intervening** pada periode 2019–2023. Penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris mengenai peran belanja publik dalam meningkatkan IPM baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan anggaran berbasis kinerja yang lebih efektif, sedangkan secara akademis penelitian ini memperkaya literatur mengenai hubungan belanja daerah, kualitas pelayanan

publik, dan pembangunan manusia di tingkat regional.

Berdasarkan uraian di atas, didukung dengan data yang ada, maka rumusan serta tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Daerah Bidang Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2019-2023.
2. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Daerah Bidang Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023.
3. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Daerah Bidang Infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023.
4. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Daerah Bidang pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang di mediasi oleh kualitas pelayanan publik di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023.
5. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Daerah Bidang kesehatan terhadap Indeks Pembangunan yang di mediasi kualitas pelayanan publik Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023.
6. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Daerah Bidang infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan yang di mediasi kualitas pelayanan publik Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023.
7. Menganalisis pengaruh signifikansi seluruh variabel bebas terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dengan Kualitas pelayanan Publik sebagai Variabel intervening.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Rasionalitas Terbatas

Konsep rasionalitas terbatas (*bounded rationality*) diperkenalkan oleh Herbert Simon (1955, 1957), yang menjelaskan bahwa dalam proses pengambilan keputusan, individu maupun organisasi tidak mampu mencapai rasionalitas sempurna karena keterbatasan informasi, kapasitas kognitif, dan waktu yang dimiliki (Hidayat, 2023, p.21). Dalam konteks kebijakan publik, pemerintah daerah sering menghadapi keterbatasan dalam menentukan alokasi anggaran, sehingga keputusan terkait belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur biasanya lebih bersifat “memadai” (*satisficing*) dibandingkan “optimal” (Samita et al., 2025, p.12). Teori ini relevan untuk menjelaskan mengapa efektivitas belanja daerah terhadap pembangunan manusia tidak hanya dipengaruhi oleh besaran anggaran, tetapi juga bagaimana kualitas pelayanan publik dijalankan.

Hubungan *Bounded Rationality* dengan belanja pendidikan, belanja

kesehatan, dan belanja infrastruktur. Pertama dalam proses pengambilan keputusan alokasi anggaran. Pemerintah atau lembaga terkait termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sering kali harus memutuskan berapa besar anggaran yang dialokasikan untuk bidang tersebut dikarenakan keterbatasan informasi atas kapasitas analisis secara optimal, sering kali institusi terkait atau Pemerintah menentukan anggaran berdasar pada prioritas secara subjektif. Kedua, prioritas dan keterbatasan informasi. Keputusan mengenai belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dipengaruhi oleh informasi yang tersedia tentang kebutuhan, efektivitas penggunaan dana, dan prioritas masyarakat (Hidayat, 2023). Melalui *Bounded Rationality*, pengambil keputusan hanya mempertimbangkan faktor yang mudah diukur, sehingga keputusan tidak selalu mencerminkan solusi optimal dari segi efisiensi atau efektivitas. Ketiga, terdapat pengaruh faktor non-ekonomi. Faktor politik, sosial, dan budaya turut mempengaruhi keputusan belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Batasan kognitif membuat pengambil keputusan lebih cenderung mengandalkan pengalaman, intuisi, atau kebiasaan daripada analisis mendalam yang dapat menyebabkan alokasi dana yang tidak sepenuhnya optimal. Keempat, kebijakan dan efisiensi (Hidayat, 2023). *Bounded rationality* dapat menyebabkan terjadinya keputusan yang pragmatis dan cepat, tetapi juga berpotensi mengurangi efisiensi dalam penggunaan dana pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Teori *Bounded Rationality* menjelaskan bahwa keputusan belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur seringkali dipengaruhi oleh keterbatasan informasi, kapasitas kognitif, dan waktu pengambil keputusan. (Hidayat, 2023). Hal ini berimplikasi pada alokasi dana yang mungkin tidak selalu optimal secara teori ekonomi, tetapi cukup memadai dan realistik sesuai dengan kondisi dan batasan yang ada.

Pengambilan keputusan dalam entitas publik, termasuk dalam alokasi **belanja pendidikan (X1), belanja kesehatan (X2), dan belanja infrastruktur (X3)**, seringkali tidak dapat diasumsikan sebagai proses yang sepenuhnya rasional dan optimal. Dalam praktiknya, para pembuat kebijakan dihadapkan pada kendala informasi, keterbatasan kognitif, dan batasan waktu, yang secara fundamental membatasi kemampuan mereka untuk mempertimbangkan semua alternatif yang tersedia dan memprediksi semua konsekuensi. Fenomena ini dijelaskan dengan baik oleh Teori Rasionalitas Terbatas (*Bounded Rationality Theory*) yang diperkenalkan oleh Herbert A. Simon (1955, 1957).

Konsep Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komprehensif yang digunakan untuk menilai kualitas hidup masyarakat melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan (umur harapan hidup), pendidikan (tingkat pendidikan), dan standar hidup (pendapatan) (Hartanto et al., 2023; Hamid et al., 2024). Konsep ini diperkenalkan UNDP sejak 1990 sebagai paradigma pembangunan manusia yang menekankan perluasan pilihan dan pengembangan kemampuan individu, sehingga lebih luas dibandingkan sekadar pembangunan ekonomi (Darwin, 2022; Hamid et al., 2024). Di Indonesia, IPM menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah karena peningkatannya mencerminkan pemerataan akses pendidikan, layanan kesehatan yang lebih baik, serta peningkatan pendapatan masyarakat (Prastiwi & Handayani, 2021; Palayukan, 2019). Melalui IPM, pemerintah dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dengan pengalokasian anggaran pada sektor-sektor strategis, serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian, IPM tidak hanya menggambarkan capaian pembangunan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam merancang strategi peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata di seluruh wilayah (Tjodi et al., 2018; Darwin, 2022).

Belanja Pemerintah / Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan bagian penting dari kebijakan fiskal yang bertujuan mengelola perekonomian melalui penetapan penerimaan dan belanja negara/daerah. Menurut Badrudin (dalam Sumiyarti & Pratama, 2024), pengeluaran konsumsi pemerintah mencakup belanja pegawai, penyusutan barang modal, serta belanja barang rutin dikurangi penerimaan dari barang/jasa yang dihasilkan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Secara prinsip, setiap pengeluaran negara diarahkan untuk optimalisasi pemanfaatan dana guna mendukung produktivitas aparatur, peningkatan kualitas layanan publik, pengawasan pembangunan, dan pemeliharaan aset negara (Manurung, 2025; Ratuludji et al., 2023).

Pengeluaran pemerintah terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin meliputi belanja pegawai, barang, pemeliharaan, perjalanan dinas, bunga pinjaman, subsidi, bantuan, serta pengeluaran tak terduga (Bandiyono, 2018). Sementara itu, pengeluaran pembangunan dialokasikan untuk mendukung proyek-proyek perubahan dan perbaikan di berbagai sektor sesuai prioritas pembangunan (Nahumuri, 2019; Palayukan, 2019).

Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, pengeluaran pemerintah tercermin dalam APBN di tingkat pusat dan APBD di tingkat daerah. Tujuannya

adalah menjaga stabilitas harga, meningkatkan output, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi (Darwin, 2022; Hartanto et al., 2023). Selain berperan sebagai instrumen pembiayaan kebijakan, pengeluaran ini juga menjadi bentuk investasi pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung (Solikin, 2018).

Di tingkat daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mendefinisikan belanja daerah sebagai semua kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam satu periode anggaran (Kristi, 2020). Belanja daerah terbagi menjadi belanja langsung—yang mencakup belanja pegawai, barang/jasa, dan modal—serta belanja tidak langsung yang meliputi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, transfer antar pemerintah, dan belanja tidak terduga (Sumiyarti & Pratama, 2024). Ketentuan lebih lanjut ditegaskan dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2024, dimana belanja daerah diarahkan untuk mendukung pelaksanaan urusan wajib terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai kewenangan pemerintah daerah (Hasyim, 2024; Hamid et al., 2024).

Belanja pendidikan

Pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan layanan pendidikan yang memadai. Belanja pendidikan, yang menjadi salah satu komponen utama dalam anggaran daerah, berfungsi tidak hanya sebagai upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan, tetapi juga sebagai strategi untuk memperkuat dimensi pendidikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Hasyim, 2024; Sumiyarti & Pratama, 2024; Darwin, 2022). Alokasi anggaran yang lebih besar terbukti berhubungan positif dengan peningkatan literasi, rata-rata lama sekolah, serta kualitas tenaga pendidik, yang secara langsung memperluas kesempatan ekonomi dan sosial masyarakat (Tumbuan et al., 2023). Selain itu, pembangunan infrastruktur pendidikan dan penyediaan fasilitas belajar yang lebih baik turut mendorong terciptanya lingkungan pembelajaran yang kondusif (Aquariansyah, 2019). Dengan demikian, belanja pendidikan tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kecerdasan dan keterampilan individu, tetapi juga berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial, mempercepat pemerataan pembangunan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Namun, beberapa penelitian menemukan hasil berbeda, misalnya Prastiwi dan Handayani (2021, p.63) yang menyatakan belanja pendidikan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap IPM di Jawa Tengah.

Belanja Kesehatan

Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan merupakan investasi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan

kesehatan yang berkualitas. Alokasi anggaran ini diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 yang wajibkan pemerintah pusat mengalokasikan minimal 5% APBN dan pemerintah daerah minimal 10% APBD di luar gaji (Tjodi et al., 2018). Belanja kesehatan berperan penting dalam pembangunan karena berdampak langsung pada produktivitas dan kapabilitas manusia melalui peningkatan infrastruktur kesehatan, tenaga medis, serta pemerataan akses layanan, termasuk di daerah terpencil (Hartanto et al., 2023; Fajar & Indrawati, 2020). Pengeluaran yang lebih besar untuk sektor ini terbukti meningkatkan indikator kesehatan masyarakat, khususnya angka harapan hidup, yang merupakan dimensi utama dalam IPM (Purnomoratih & Ramadhani, 2023). Selain memperkuat upaya pencegahan dan penanganan penyakit menular maupun tidak menular, belanja kesehatan juga berkontribusi pada perbaikan gizi, peningkatan kualitas hidup, serta penguatan sistem kesehatan yang inklusif. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan tidak hanya mendorong peningkatan IPM, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan. Sari et al. (2016, p.79) juga menunjukkan belanja kesehatan berpengaruh positif signifikan terhadap IPM, sementara Prastiwi dan Handayani (2021, p.64) menemukan pengaruh negatif signifikan, menunjukkan adanya potensi ineffisiensi dalam pengelolaan anggaran kesehatan.

Belanja infrastruktur

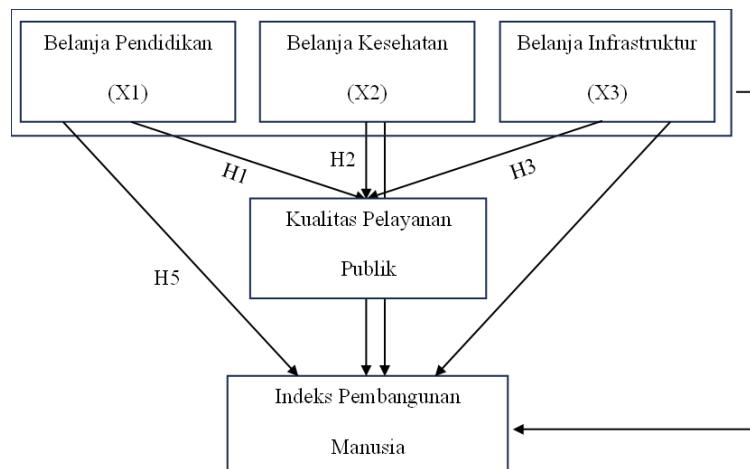
Pengeluaran pemerintah pada bidang infrastruktur berperan strategis dalam pembentukan modal fisik yang mendukung kelancaran pembangunan serta peningkatan aktivitas ekonomi. Belanja infrastruktur yang mencakup pembangunan jalan, fasilitas umum, dan jaringan transportasi tidak hanya memperlancar distribusi barang dan jasa, tetapi juga meningkatkan konektivitas wilayah, aksesibilitas layanan publik, serta kualitas hidup masyarakat (Saputra et al., 2023; Muafiq & Chariri, 2023). Infrastruktur yang baik menjadi fondasi pengembangan sektor sosial dan ekonomi dengan menyediakan akses lebih mudah terhadap pendidikan dan kesehatan, sehingga berkontribusi langsung pada peningkatan dimensi IPM (Nashshar & Mulyana, 2020; Prastiwi & Handayani, 2021). Peningkatan belanja infrastruktur terbukti memperbaiki akses masyarakat ke pelayanan dasar, mengurangi kesenjangan antar wilayah, mendorong investasi, membuka lapangan pekerjaan, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan (Musthofa et al., 2024). Oleh karena itu, alokasi anggaran infrastruktur yang memadai sangat penting sebagai instrumen pembangunan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian IPM yang lebih tinggi. Namun, hasil penelitian Ratuludji et al. (2023, p.20) menunjukkan bahwa belanja infrastruktur justru berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM, yang mengindikasikan bahwa pembangunan

infrastruktur sering kali belum langsung menyentuh dimensi kesehatan dan pendidikan.

Kualitas Pelayanan Publik sebagai Variabel Intervening

Kualitas pelayanan publik merepresentasikan efektivitas implementasi kebijakan anggaran. Meskipun alokasi anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur meningkat, dampaknya terhadap IPM sangat bergantung pada kualitas pelayanan yang diberikan (Ratuludji et al., 2023, p.23). Almahdali (2025, p.34) menegaskan bahwa pelayanan publik yang baik menjadi penghubung antara belanja daerah dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kualitas pelayanan publik dipandang sebagai variabel mediasi yang memperkuat pengaruh belanja daerah terhadap IPM.

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis



Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. H1: Belanja pendidikan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
2. H2: Belanja kesehatan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
3. H3: Belanja infrastruktur berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
4. Seperti penelitian yang dilakukan Friska Ulina Pasaribu (2021), Andra Fadhil Martin (2022), Dwi Putri dan Menik Kurnia (2022), Adam Hawari (2021) yang menunjukkan bahwa belanja daerah bidang pendidikan memiliki hubungan terhadap IPM

H4: Belanja pendidikan berpengaruh positif terhadap IPM melalui kualitas

pelayanan publik.

5. Penelitian yang sejalan menemukan bahwa hubungan kuat antara belanja Kesehatan dengan IPM yaitu, Maryozi *et al* (2022), Damayanti & Suryaningrum (2023), Ningsih & Kara, (2023), dan Ratuludji *et al.*, (2023).

H5: Belanja kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM melalui kualitas pelayanan publik.

6. Penelitian yang sejalan juga dilakukan oleh Wibowo (2021), Maryozi *et al.*, (2022), Randa & Fani (2023), Hamid *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa belanja infrastruktur berhubungan positif dengan IPM

H6: Belanja infrastruktur berpengaruh positif terhadap IPM melalui kualitas pelayanan publik.

7. Penelitian yang sejalan menemukan bahwa hubungan kuat antara peran pelayanan publik sebagai mekanisme perantara (intervening) dalam efektivitas belanja pemerintah yaitu Rahmawati (2020), Harsono et al (2022) Ratuludji et al (2023), Almahdali (2025).

H7: Kualitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap IPM.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang dianalisis berbentuk angka atau statistik yang mencerminkan nilai tiap variabel. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengukur serta menjelaskan hubungan antar variabel secara objektif melalui proses penelitian yang dirancang secara terstruktur dan sistematis.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 100 hari yang mana mencakup pengambilan data primer pada web, dan melakukan pengolahan data.

Subjek Penelitian

Seluruh Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah merupakan subjek penelitian ini dengan menggunakan Sampel Jenuh yang totalnya 170 .

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan yaitu data Sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran per Daerah, Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Kualitas Pelayanan Publik, data tersebut diperoleh melalui masing-masing sumber diantaranya dari laporan realisasi anggaran dari Kemenkeu dan Indeks dari Badan Pusat Statistik.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu statistik deskriptif, yang berfungsi untuk menyajikan dan merangkum data berdasarkan aspek-aspek penting yang terkandung di dalamnya. Pengolahan data dilaksanakan dengan bantuan perangkat lunak *Statistical Package for the Social Sciences/ SPSS* versi 26. Pada penelitian ini menggunakan analisis jalur (*Path Analysis*) dengan menggunakan teknik analisis persamaan jalur, dengan rumus :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4Z + e$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Regresi Persamaan Substruktur I

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1	(Constant)	1.284	.045	28.729	.000
	X1_Kuadrat	-6.677E-25	.000	-.644	.000
	X2_Kuadrat	5.059E-25	.000	.235	.014
	X3_Kuadrat	1.879E-25	.000	.036	.514
					.608

a. Dependent Variable: Z_Kuadrat

Sumber : Data Primer yang diolah

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat regresi persamaan substruktur II sebagai berikut :

$$Z = 1,284 - 6,677 X_1 + 5,059 X_2 + 1,879 X_3 + e$$

Berdasarkan Persamaan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (a) memiliki nilai 1,284. Hal ini menunjukkan bahwa ketika variabel independen yaitu Belanja Pendidikan (X1), Belanja Kesehatan (X2) dan Belanja Infrastruktur (X3) tidak mempengaruhi variabel dependen yaitu KPP (Y) atau dengan kata lain semua variabel independen bernilai 0, maka nilai variabel dependen yaitu KPP (Y) sebesar 1,284.
2. Koefisien regresi variabel Belanja Pendidikan (X1) sebesar (-6,677). Hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 Rupiah pada variabel Belanja Pendidikan (X1), maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan turun sebesar 4,29 dengan asumsi variabel lainnya konstan.
3. Koefisien regresi variabel Belanja Kesehatan (X2) sebesar 5,059. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 Rupiah pada variabel Belanja Kesehatan (X2), maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan meningkat sebesar 1,89 dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.

4. Koefisien regresi variabel Belanja Infrastruktur (X3) sebesar 1,879. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 Rupiah pada variabel Belanja Infrastruktur (X3), maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan meningkat sebesar 1,879 dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.

Tabel 2. Hasil Regresi Persamaan Substruktur II

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	65.079	1.140		57.090	.000
X1_Kuadrat	-5.526E-24	.000	-.395	-4.691	.000
X2_Kuadrat	1.487E-23	.000	.513	6.760	.000
X3_Kuadrat	1.032E-23	.000	.147	2.671	.008
Z_Kuadrat	7.533	.808	.558	9.320	.000

a. Dependent Variable: Indeks Pembangunan Manusia

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat regresi persamaan substruktur II sebagai berikut :

$$Y = 65,079 + (-5,52)X_1 + 1,48X_2 + 1,032X_3 + 7,533Z + e$$

Berdasarkan Persamaan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Nilai konstanta (a) memiliki nilai 65,079. Hal ini menunjukkan bahwa ketika variabel independen yaitu Belanja Pendidikan (X1), Belanja Kesehatan (X2) dan Belanja Infrastruktur (X2) dan Kualitas pelayanan Publik (Z) tidak mempengaruhi variabel dependen yaitu IPM (Y) atau dengan kata lain semua variabel independen bernilai 0, maka nilai variabel dependen yaitu IPM (Y) sebesar 65,079.
- Koefisien regresi variabel Belanja Pendidikan (X1) sebesar (-5,52). Hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 Rupiah pada variabel Belanja Pendidikan (X1), maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan menurun sebesar 6,43 dengan asumsi variabel lainnya konstan.
- Koefisien regresi variabel Belanja Kesehatan (X2) sebesar 1,48. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 Rupiah pada variabel Belanja Kesehatan (X2), maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan meningkat sebesar 1,48 dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.
- Koefisien regresi variabel Belanja Infrastruktur (X3) sebesar 1,03. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 Rupiah pada variabel Belanja Infrastruktur (X3), maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan meningkat sebesar 1,03 dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.

5. Koefisien regresi variabel Kualitas pelayanan publik (Z) sebesar 7,53. hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 Rupiah pada variabel Z maka Indeks Pembangunan Manusia(IPM) akan meningkat sebesar 7,53 poin dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Tabel 3 Hasil Uji Koefisien Determinasi R Square Model I

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.592 ^a	.350	.339	.114807

a. Predictors: (Constant), Belanja Infrastruktur, Belanja Kesehatan, Belanja Pendidikan

Sumber : Data primer yang Diolah

Berdasarkan tabel 3 Diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,350. Hasil ini menjelaskan bahwa persentase pengaruh variabel independen (Belanja Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur) terhadap variabel intervening kualitas pelayanan publik sebesar 35%. Sedangkan sisanya senilai 65% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Berdasarkan uji R2 diatas, nilai error pada regresi model 2 adalah $e1 = \sqrt{1-(0,350)} = 0,806$.

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi R Square Model II

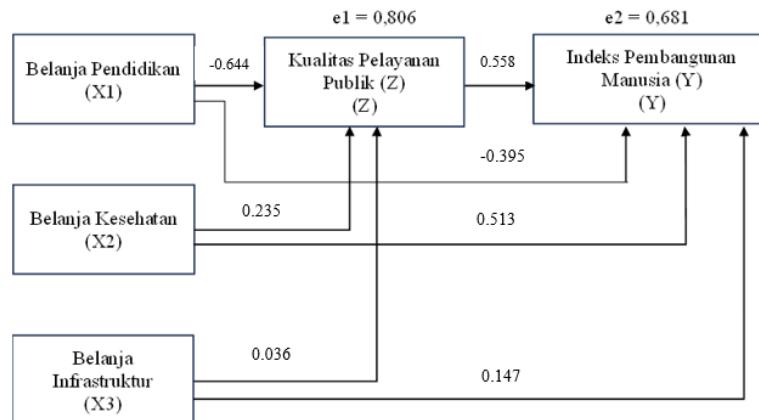
Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.732 ^a	.536	.526	3.03815

a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan Publik, Belanja Infrastruktur, Belanja Kesehatan, Belanja Pendidikan

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4 Diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,536. Hasil ini menjelaskan bahwa persentase pengaruh variabel independen (Belanja Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur) terhadap variabel intervening kualitas pelayanan publik sebesar 53,6%. Sedangkan sisanya senilai 47,4% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Berdasarkan uji R2 diatas, nilai error pada regresi model 2 adalah $e2 = \sqrt{1-(0,536)} = 0,681$.

Bersumber dari data yang diolah dan dinyatakan dalam model *Estimation Path Analysis* seperti gambar berikut:



Gambar 1 Diagram Hasil Analisis Jalur (Path Analysis)

Tabel 5. Hasil Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung antar Variabel

Hubungan	Pengaruh	
	Langsung	Tidak Langsung
X1 terhadap Y	-0,395	
X2 terhadap Y	0,513	
X3 terhadap Y	0,147	
Z terhadap Y	0,558	
X123 terhadap Y melalui Z		- X1 = -0,459 - X2 = 0,131 - X3 = 0,020

Sumber : hasil Penelitian 2025

PEMBAHASAN

Pengaruh Belanja Pendidikan terhadap Kualitas pelayanan Publik

Berdasarkan pengujian hipotesis melalui uji t (uji parsial) menunjukkan bahwa belanja pendidikan hasil nilai t hitung adalah $-6,738 < 1,653$, Sedangkan nilai signifikansi variable Belanja Pendidikan bernilai $0,00 < 0,05$, Dengan begitu variabel Belanja pendidikan memiliki **pengaruh negatif dan signifikan** terhadap KPP (Z) . Artinya hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini **ditolak**.

Belanja pendidikan terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan publik karena anggaran yang besar tidak mencerminkan efektivitas dan akuntabilitas yang baik. Sebagian dana masih terserap pada birokrasi dan program kurang relevan, sementara dampaknya terhadap kualitas SDM memerlukan waktu panjang untuk terlihat. Kondisi ini menunjukkan adanya ineffisiensi atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran, sehingga belum mampu secara langsung mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Secara teoritis, hasil ini sejalan dengan konsep *Bounded Rationality*, di mana keterbatasan

informasi, waktu, dan kapasitas membuat pengelolaan anggaran pendidikan sering lebih fokus pada aspek administratif daripada peningkatan layanan publik. Akibatnya, belanja pendidikan yang tinggi tidak selalu menghasilkan kualitas layanan lebih baik karena adanya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi, lemahnya pengawasan, serta dominasi belanja rutin. Hal ini konsisten dengan temuan Prastiwi & Handayani (2021) yang menunjukkan belanja pendidikan di Jawa Tengah cenderung tidak signifikan bahkan negatif terhadap variabel sosial.

Pengaruh Belanja Kesehatan terhadap Kualitas pelayanan Publik

Berdasarkan pengujian hipotesis melalui uji t (uji parsial) menunjukkan bahwa belanja pendidikan hasil nilai t hitung adalah $2,474 > 1,653$. Sedangkan nilai signifikansi variabel X2 bernilai $0,014 < 0,05$, Dengan begitu variabel Belanja kesehatan memiliki **pengaruh positif dan signifikan** terhadap KPP. Artinya hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini **diterima**.

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar alokasi anggaran kesehatan, semakin baik kualitas pelayanan publik yang dirasakan masyarakat. Belanja kesehatan yang efektif mencerminkan investasi sosial melalui pembangunan fasilitas, penguatan tenaga medis, dan pelayanan promotif-preventif, sehingga berdampak langsung pada kualitas hidup. Dari perspektif *Bounded Rationality*, kebijakan yang dikelola secara efisien akan menjadikan belanja kesehatan tidak sekadar menyerap anggaran, tetapi juga meningkatkan mutu pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Berdasarkan data Jateng Provinsi dan BPS, pemerintah daerah perlu memperkuat anggaran pada layanan primer seperti puskesmas, posyandu, serta sistem pembiayaan dan rujukan terintegrasi JKN. Inovasi digital, seperti rekam medis elektronik dan donor darah online di RSUD, juga meningkatkan kualitas layanan lokal. Kolaborasi anggaran lintas pemerintah mendorong efektivitas belanja kesehatan, yang nyata terasa dalam percepatan rujukan dan integrasi data layanan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Darwin (2022) dan Ratuludji et al. (2023) bahwa belanja kesehatan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya melalui penguatan layanan dasar. Dengan demikian, belanja kesehatan menjadi komponen strategis dalam membangun sistem pelayanan yang responsif, terjangkau, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pengaruh Belanja Infrastruktur terhadap Kualitas pelayanan Publik

Berdasarkan pengujian hipotesis melalui uji t (uji parsial) menunjukkan bahwa belanja pendidikan hasil nilai t hitung adalah $0,514 < 1,653$. Sedangkan nilai signifikansi variabel X3 bernilai $0,608 < 0,05$, Dengan begitu variabel Belanja infrastruktur tidak memiliki **pengaruh dan tidak signifikan** terhadap KPP. artinya hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini **ditolak**.

Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun anggaran infrastruktur meningkat, tidak ada perubahan signifikan pada kualitas pelayanan publik. Contohnya, Kabupaten Semarang dan Sragen dengan belanja infrastruktur yang tinggi tetap memiliki nilai KPP yang stagnan. Hal ini menandakan bahwa realisasi APBD/APBN 2023 belum sepenuhnya mendukung layanan publik secara optimal, karena pembangunan fisik sering tidak diiringi dengan peningkatan SDM, sistem digital, maupun tata kelola layanan. Hasil penelitian 2023 di kabupaten/kota Jawa Tengah membuktikan belanja infrastruktur tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan publik, sejalan dengan Fajar & Indrawati (2020) yang menekankan pentingnya integrasi layanan, kapasitas pelaksana, dan efisiensi anggaran.

Pengaruh Belanja Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan pengujian hipotesis melalui uji t (uji parsial) menunjukkan bahwa belanja pendidikan hasil nilai t hitung adalah **-4,691 < 1,653**, Sedangkan nilai signifikansi variabel Belanja Pendidikan **0,00 < 0,05**, Dengan begitu variabel Belanja pendidikan memiliki **pengaruh negatif dan signifikan** terhadap Indeks Pembangunan Manusia, artinya hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini **ditolak**.

Hal ini membuktikan bahwa setiap peningkatan belanja pendidikan sebesar 1% justru diikuti dengan penurunan IPM sebesar 3,901 poin. Kondisi ini dapat dijelaskan melalui beberapa faktor, antara lain rendahnya efektivitas penggunaan anggaran pendidikan yang cenderung didominasi oleh belanja pegawai dibandingkan belanja modal, serta adanya jeda waktu (*time lag*) dalam penyerapan manfaat, mengingat investasi di sektor pendidikan memerlukan periode tertentu untuk memberikan dampak pada indikator pendidikan seperti Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Ini menunjukkan tren belanja pendidikan dan IPM di Jawa Tengah 2019–2023. Belanja pendidikan meningkat signifikan dari indeks 100 (2019) menjadi 139,5 (2023) atau rata-rata naik 8,7% per tahun. Namun, IPM hanya naik tipis dari 72,10 (2019) ke 72,30 (2021), lalu stagnan bahkan menurun menjadi 72,15 (2023). Hal ini menggambarkan adanya kesenjangan antara besarnya anggaran dan capaian pembangunan manusia. Menurut teori *public expenditure effectiveness*, alokasi anggaran tidak efektif tanpa kualitas implementasi, keterpaduan program, dan pemerataan manfaat. Temuan ini konsisten dengan Ratnasari & Rahmawati (2021) yang menyatakan belanja pendidikan sering terserap pada belanja pegawai, terjadi *time lag*, dan rendahnya kontribusi belanja modal terhadap RLS dan HLS. Penelitian Sari et al. (2016), Zulham et al. (2017), dan Ratuludji et al. (2023) juga menegaskan bahwa anggaran besar belum berdampak nyata pada kualitas hidup karena lebih difokuskan pada pembangunan fisik daripada peningkatan kualitas pendidikan maupun mutu pendidikan. Dengan demikian, grafik ini memperkuat hasil regresi bahwa belanja pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Jawa Tengah.

Pengaruh Belanja Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan pengujian hipotesis melalui uji t (uji parsial) adalah $6,670 > 1,653$, Sedangkan nilai signifikansi variabel Pendapatan Asli Daerah bernilai $0,00 < 0,05$, Dengan begitu variabel Belanja Kesehatan memiliki **pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia** dan hipotesis kelima (H5) **diterima**.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi anggaran pada sektor kesehatan mampu mendorong peningkatan dimensi umur panjang dan hidup sehat, yang merupakan salah satu komponen utama dalam perhitungan IPM. Secara teoritis, temuan ini sesuai dengan pendekatan teori modal manusia (*human capital theory*), yang menyatakan bahwa kesehatan merupakan bentuk investasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Hasil penelitian ini didukung dengan data BPS Jawa Tengah Angka Harapan Hidup (AHH) di Jawa Tengah yang meningkat dari 74,86 di tahun 2019 menjadi 74,91 di tahun 2023 lalu dengan cakupan imunisasi dasar lengkap yang turut serta naik 91% menjadi 94% di tahun yang sama. Investasi pada kesehatan, seperti pembangunan puskesmas, optimalisasi pelayanan RSUD, dan program preventif mampu memperbaiki kesehatan masyarakat dengan menurunkan beban penyakit. Efeknya tercermin dalam kenaikan persentase AHH yang menjadi salah satu dimensi utama IPM.

Individu yang sehat cenderung memiliki kapasitas belajar dan bekerja yang lebih tinggi, sehingga berkontribusi pada produktivitas dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Peningkatan belanja kesehatan berdampak langsung pada peningkatan angka harapan hidup, penurunan angka kematian bayi dan ibu, serta penyediaan akses layanan kesehatan yang lebih merata, seperti pembangunan fasilitas kesehatan (puskesmas, rumah sakit), penyediaan obat-obatan, tenaga medis, hingga program imunisasi dan gizi. Temuan ini selaras dengan penelitian dari Astri et al., (2018) Merang Kahang, dkk (2021), Ratuludji et al., (2023), dan Harsono et al., (2024).

Pengaruh Belanja Infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan pengujian statistik melalui uji t (uji parsial) adalah $2,671 > 1,653$, Sedangkan nilai signifikansi variabel bernilai $0,008 < 0,05$, Dengan begitu variabel Belanja infrastruktur (X3) memiliki **pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y)** dan hipotesis keenam (H6) **diterima**.

Hasil analisis menunjukkan koefisien regresi belanja infrastruktur bernilai positif, menandakan adanya hubungan parsial yang mendukung peningkatan IPM di kabupaten/kota Jawa Tengah. Infrastruktur berfungsi sebagai fasilitator bagi

tercapainya indikator IPM, misalnya akses jalan yang mempermudah menuju sekolah dan rumah sakit, perumahan layak yang meningkatkan kesehatan, serta air bersih dan sanitasi yang menekan risiko penyakit. Data mendukung temuan ini, seperti rasio jalan dalam kondisi baik naik dari 75,3% (2019) menjadi 77,1% (2023), dan cakupan air bersih serta sanitasi juga meningkat meski tidak signifikan. Dalam kerangka *bounded rationality*, keputusan pembangunan infrastruktur sering pragmatis, tetapi tetap memberi dampak positif jika implementasinya efektif dan merata. Efek belanja infrastruktur cenderung bersifat tidak langsung dan memerlukan waktu (*lag effect*) untuk terlihat pada pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, infrastruktur yang memadai memperkuat efektivitas layanan publik dan kualitas hidup, sehingga alokasi anggaran perlu disertai perencanaan strategis agar dampaknya terhadap IPM lebih optimal. Temuan ini konsisten dengan penelitian Rahmawati (2020), Maryozi et al. (2022), Randa & Fani (2023), Hartanto et al. (2023), serta Sumiyarti & Lazuardy Pratama (2024).

Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan pengujian statistik melalui uji t (uji parsial) adalah $9,320 > 1,653$. Sedangkan nilai signifikansi variabel Kualitas Pelayanan Publik bernilai $0,00 < 0,05$, Dengan begitu variabel Kualitas Pelayanan Publik memiliki **pengaruh positif dan signifikan terhadap** Indeks Pembangunan Manusia dan hipotesis ketujuh (H7) Kualitas Pelayanan Publik berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) **diterima**.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di kabupaten/kota Jawa Tengah, menegaskan perannya sebagai mediator antara belanja daerah (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur) dengan pembangunan manusia. Pelayanan publik yang efektif memastikan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga anggaran yang besar tidak sia-sia. Dalam kerangka *bounded rationality* (Simon; Kahneman & Tversky), keterbatasan informasi dan kapasitas pengambil kebijakan membuat kualitas pelayanan publik menjadi kunci agar anggaran dapat digunakan secara optimal. Dengan demikian, peningkatan IPM tidak hanya bergantung pada besarnya belanja, tetapi juga pada efektivitas layanan publik melalui birokrasi yang kompeten, sistem monitoring transparan, dan pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahmawati (2020), Harsono et al. (2022), Ratuludji et al. (2023), dan Almahdali (2025) yang menekankan peran pelayanan publik sebagai variabel intervening dalam efektivitas belanja pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan kualitas pelayanan publik sebagai variabel intervening di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah periode 2019–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pendidikan berpengaruh negatif baik terhadap kualitas pelayanan publik maupun IPM, karena anggaran lebih banyak difokuskan pada pembangunan fisik dibanding peningkatan mutu tenaga pendidik. Sebaliknya, belanja kesehatan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan publik serta IPM, sehingga peningkatan anggaran kesehatan mampu memperbaiki mutu layanan dan mendorong pembangunan manusia. Belanja infrastruktur tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan publik, namun berpengaruh positif terhadap IPM karena manfaatnya baru terasa dalam jangka panjang melalui dukungan terhadap sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, kualitas pelayanan publik terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sehingga menjadi faktor kunci yang menjembatani efektivitas belanja daerah dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, besarnya alokasi anggaran belum cukup untuk meningkatkan IPM apabila tidak diiringi dengan kualitas pelayanan publik yang efektif, tepat sasaran, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, disarankan agar penelitian selanjutnya lebih menekankan fokus anggaran pendidikan pada peningkatan kualitas pengajaran, sarana belajar, serta pelatihan guru, sementara anggaran kesehatan diarahkan pada penguatan fasilitas primer, tenaga medis, dan program promotif-preventif. Pembangunan infrastruktur sebaiknya diprioritaskan untuk mendukung akses pendidikan dan kesehatan, seperti jalan menuju sekolah atau puskesmas. Selain itu, reformasi birokrasi melalui digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas aparatur, dan pengawasan transparan perlu diperkuat agar belanja publik lebih efektif. Dari sisi metodologi, peneliti berikutnya dianjurkan memeriksa kelengkapan dan keandalan data sejak awal, menambahkan variabel lain seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, atau partisipasi masyarakat, serta mempertimbangkan pendekatan *mixed methods* untuk menggali realitas sosial secara lebih komprehensif. Hasil penelitian ini juga tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh provinsi di Indonesia karena hanya berfokus pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah periode 2019–2023.

REFERENSI

- Adi Hermawan, & H. Yusran. (2017). *Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif*. Kencana Prenada Media.

- Ala, H. M. (2015). Pengaruh Belanja Langsung Sektor Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Pertanian Terhadap IPM (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Provinsi NTT). *WAHANA*, 18(2), 163–174.
- Alayda, F. D., Sodik, J., & Nuryadin, D. (2022). Determinan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2020. *SIBATIK*, 1(6), 897–906.
- Almahdali, H. (2025). Tantangan dan Peluang Inovasi Pelayanan Publik di Era Revolusi Industri 4.0 (Challenges and Opportunities for Public Service Innovation in the Industrial Revolution 4.0 Era). *JASISPOL*, 4(2), 63–73.
- Alwasilah, & Chaedar, A. (2011). *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Pustaka Jaya.
- Anantika, D. A., & Sasana, H. (2020). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Korupsi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Negara APEC. *Diponegoro Journal Of Economics*, 9(3), 167–178.
- Anshori, I. (2017). Perilaku Memilih Lembaga Pendidikan: Perspektif Teori Rational Choice dan Bounded Rational. *Proceeding Conference FKIP Umsida*, 136–160.
- Aquariansyah, F. (2019). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2016 dalam Perspektif Ekonomi Islam. In *Skripsi*.
- Astri, M., Nikensari, S. I., & Kuncara, H. (2018). Sri Indah Nikensari, SE, M.Si (. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 77–102.
- Bandiyono, A. (2018). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Fungsi Terhadap Peningkatan IPM dan Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh). *Info Artha*, 2(1), 11–28. <https://doi.org/10.31092/jia.v2i1.235>
- Damayanti, A. P., & Suryaningrum, D. H. (2023). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipmp). *Jurnal Maneksi*, 12(3), 614–627. <https://doi.org/10.31959/jm.v12i3.1733>
- Darwin, D. (2022). Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan. In *Thesis*. Universitas Hasanudin.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2019). Kajian Fiskal Regional Tahun 2018. In *DJPb Indonesian Treasury*.
- Fajar, M. A., & Indrawati, L. (2020). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan dan Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum Terhadap Indeks Pembangunan

- Manusia (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 108–118.
- Gede, I. P., Sugiono, F., Bagus, I., & Purbadharma, P. (2019). Pengaruh PAD dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemiskinan dan IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *EP Unud*, 1(2), 361–388.
- Ghozali. (2018a). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 24*. Universitas Diponegoro.
- Ghozali, A. (2018b). Metode Penelitian Kualitatif. In *Salemba Empat*. Salemba Empat.
- Hamid, F., Samsir, A., & Alam, S. (2024). Analisis Pengaruh Belanja Infrastruktur Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Barat. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 911–921.
- Handayani. (2020). Bab III Metode Penelitian. *Suparyanto Dan Rosad* (2015, 5(3), 248–253.
- Handayani, N. (2022). Pengaruh IPM, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Kab Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019. *Diponegoro Journal Of Economics*, 11(1), 26.
- Harsono, I., Purnama, I., Firmansyah, M., & Irwan, M. (2024). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi NTB Tahun 2013-2022. *MSEJ*, 5(1), 802–810.
- Harsono, I., Purnama, I., Firmansyah, M., Irwan, M., Kesehatan, B., Kemandirian, D. A. N., Saputra, I., Supeno, B., Wardi, J., Gede, I. P., Sugiono, F., Bagus, I., Purbadharma, P., Musthofa, M., Muafiq, R. R., Chariri, A., Untuk, D., Salah, M., Syarat, S., ... Virniasari. (2022). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan dan Belanja Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Studi Pada 22 Kabupaten/Kota di NTT). *Media Ekonomi*, 3(2), 1–11. <https://doi.org/10.31849/niara.v15i1.7380>
- Hartanto, T., Idrus, J., & Virniasari, V. (2023). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Dan Belanja Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2022. *Trans Ekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 3(5), 915–926. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v3i5.534>
- Hasyim, M. (2024). Tantangan dan Peluang Pendidikan Kesehatan di Era Digital: Membangun Kesadaran Kesehatan Online. *Oshada*, 1(2), 16–24. <https://doi.org/10.62872/4kd2xy97>
- Hidayat, Y. F. (2023). Kebijakan El Salvador dalam Mengadopsi Bitcoin Sebagai Legal Tender Pada Tahun 2017-2021. In *Skripsi: Vol. VIII (Issue I)*. UII.

Irsalina. (2022). *Pengaruh Belanja Pemerintah di Fungsi Pendidikan Kesehatan dan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Aceh Periode 2016-2019 Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam*. UIN Ar-Raniry Aceh.

Iwang, B. (2023). Pendapatan Asli Daerah, Belanja Kesehatan dan Pendidikan, serta Pertumbuhan Ekonomi sebagai Faktor Penentu Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Barat. *Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 4(2).

Jazet Raco. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (OSF (ed.)). OSF.

Kristi, D. (2020). Analisis Kausalitas Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di 34 Provinsi di Indonesia (2010-2019). *UGM*, 3(1968), 2019–2020.

Lotam, M., Purba, A., & Arka, S. (2024). Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Gema Wisata*, 20(September).

M. Anshori, & S. Iswati. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Airlangga University Press.

Manurung, P. R. (2025). Dasar Pengeluaran Pemerintah. In *Skripsi* (Vol. 8, Issue 4).

Maryozi, Z., B. Isyandi, & Ando Fahda Aulia. (2022). Pengaruh Pengeluaran Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Jalan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 15(1), 1-11. <https://doi.org/10.31849/niara.v15i1.7380>

Merang Kahang, Muhammad Saleh, R. B. S. (2021). PENGARUH PENGELOUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR. *Kodifikasi : Jurnal Penelitian Islam*, Vol 15, No. 01 (2021), 133-158, 15(01), 133–158.

Mongan, J. J. S. (2019). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 163–176. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i2.122>

Muafiq, R. R., & Chariri, A. (2023). Desentralisasi Fiskal, Efektivitas Penyerapan Anggaran, Belanja Modal, Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah: Kinerja Pemerintah Daerah sebagai Variabel Moderasi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(4), 1-15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>

Musthofa, M., Fadhilah, T. I., & Tambunan, K. (2024). Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Sosial Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening di Kota Medan. *JEKOMBIS*, 3(1).

- Nahumuri, L. L. (2019). Esensi dan Urgensi Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v4i1.597>
- Nashshar, M. I., & Mulyana, B. (2020). Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, Dan Kebijakan Publik*, 7(2022), 255–270.
- Nashshar, M. I., & Mulyana, B. (2022). INDONESIAN TREASURY REVIEW PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL MEDIASI Budi Mulyana. *Indonesian Treasury Review*, 7(03), 255–270.
- Ningsih, I. R., & Kara, M. (2023). Pengaruh Belanja Pemerintah di Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Inflasi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan di Sulawesi Selatan. *ICOR: Journal of Regional Economics*, 4(1), 40–54.
- Nugroho, W. A. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Magelang Tahun 2006-2018. *DINAMIC*, 2(2).
- Palayukan, M. (2019). Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia: Studi Kasus Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 12(2), 74–91. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v12i2.376>
- Parasan, P. M., Opod, C. R., & Tooy, S. M. (2023). Analisis Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi*, 4(1), 223–236.
- Prastiwi, S. A., & Handayani, H. (2021). Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan PDRB Terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus 35 Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah). *Diponegoro Journal Of Economics*, 10(3), 135–147.
- Prastiwi, S. A. T., & Handayani, H. R. (2021). ... Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Pdrb Terhadap Ipm Di Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus 35 Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of ...*, 10, 135–147. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jme/article/view/39681%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jme/article/download/39681/29246>
- Prof. Dr. Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (19th ed.). Alfabeta.
- Prof. Ir. Dr. Raihan. (2019). *Metodologi Penelitian*. UIJPres.
- Purnomoratih, Y., & Ramadhani, S. N. (2023). Peran Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Terhadap Pembangunan SDM

Kalimantan Selatan. *Manajemen Perbendaharaan*, 4(2), 106–123.

Raharti, R., Sarnowo, H., & Aprillia, L. N. (2020). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 6(1), 36–53. <https://doi.org/10.24815/jped.v6i1.16364>

Rahmawati, A. Y. (2020). Belanja Daerah. In *Universitas Atma Jaya*.

Randa, F., & Fani, L. A. (2023). Pengaruh Infrastruktur dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Penyerapan Tenaga Kerja serta Implikasi Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5, 1405–1408. <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i4.755>

Ratuludji, S. P., Preseveranda, & Man, S. (2023). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Dan Belanja Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipms) (Studi Pada 22 Kabupaten/Kota Di Ntt). *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 08(01), 1–11.

Rochdi, N. (2009). Ulasan Konsep Pembangunan Manusia Yang di Kembangkan Oleh United Nations development programme. *ITU News*, 5, 22–23. <http://ejournal.uajy.ac.id/3959/3/2EP18051.pdf>

Samita, G. R., Wisesa, W., Setiawan, E. D., & Hidayat, R. (2025). Integrasi Artificial Intelligence dan Teori Bounded Rationality dalam Mengatasi Ketidakpastian Pengambilan Keputusan Bisnis di Era Big Data. *Jurnal Bisnis Dan Komunikasi Digital*, 2(2), 1–12.

Sandri, N. K., Ayu, I. G., Asri, M., Putri, D., & Dwirandra, A. A. N. B. (2018). Kemampuan Alokasi Belanja Modal Memoderasi Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 21(1), 71–81.

Saputra, I., Supeno, B., & Wardi, J. (2023). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Pada Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Riau. *Jurnal Komunitas Sains Manajemen*, 2(2), 234–250. <http://www.jkmk.akademimanajemen.or.id>

Sari, A. I. C., Zakiah Fithah A'ini, & Martinus Tukiran. (2016). Pengaruh Anggaran Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Journal of Applied Business and Economic (JABE)*, 9(2), 127–136.

Solikin, A. (2018). Pengeluaran Pemerintah dan Perkembangan Perekonomian (Hukum Wagner) di Negara Sedang Berkembang: Tinjauan Sistematis. *Info Artha*, 2(1), 65–89. <https://doi.org/10.31092/jia.v2i1.237>

Sukartini, N. M., & Saleh, S. (2012). Pengujian Hukum Wagner dalam Perekonomian Indonesia Kajian Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 19(1), 1–24.

- Sulisty, D. P. (2019). *Analisis Pengaruh Belanja Daerah Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Kemandirian Fiskal Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2016)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sumiyarti, & Lazuardy Pratama, C. (2024). Pengaruh Belanja Kesehatan, Belanja Pendidikan, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap IPM di Provinsi Jawa Barat. *Media Ekonomi*, 31(2), 181–194. <https://doi.org/10.25105/me.v31i2.18510>
- Suparno, H. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Timur. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.22219/jibe.vol5.no1.1-22>
- Suparto. (2014). *Otonomi Daerah di Indonesia ; Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya*. 1–25.
- Tarumingkeng, W., Rumate, V., & Rotinsulu, O. (2018). Pengaruh Belanja Modal dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(5), 1–18.
- Tjodi, A. M., Rotinsulu, O., & Kawung, G. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi (Studi di Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(8).
- Tumbuan, C. C ., Rorong, I. P. F., & Tumangkeng, S. Y. . (2023). Pengaruh Belanja Modal, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(04), 191–202.
- V.W. Sujarweni. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Pustaka Baru Press.
- Widyaningrum, R. (2021). *Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Karakteristik Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Universitas Islam Indonesia.
- Zulham, T., Seftarita, C., & Muliza. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan dan PDRB terhadap IPM di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(1), 51–69.